

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Akses Pembiayaan Melalui Program SEHATKAN dalam Mengembangkan Usaha Budidaya Ikan Oleh Dinas Perikanan

Salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan pembudidayaan sumber daya ikan adalah tersedianya pembangunan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pembudidayaan ikan tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan pembudidayaan sumber daya ikan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengaturnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 UU No.31 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.¹¹⁹

Salah satunya adalah pembuatan program SEHATKAN oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jendral Perikanan Budidaya dengan Direktorat Jendral Hubungan Hukum Keagrariaan yang bertujuan untuk menyiapkan lahan pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria agar dapat diproses penerbitan sertifikat hak atas tanahnya, untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki dan selanjutnya dapat digunakan sebagai agunan kredit pada perbankan dan sumber pembiayaan

¹¹⁹H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*,... hal.146

lainnya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan.¹²⁰ Yang nantinya akan dikelola oleh Dinas yang terkait di setiap Kabupaten/kota masing-masing, yang salah satunya adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

Dengan dibuatnya program tersebut diharapkan pembudidaya ikan khususnya di kabupaten Tulungagung mampu memperoleh akses permodalan dengan mudah, sehingga kebutuhan modal yang dibutuhkan akan tercukupi yang akan berdampak pada pengelolaan usaha budidaya ikan yang dikelola bisa berkembang menjadi lebih baik untuk kedepannya.¹²¹

Setiap kebijakan maupun program yang telah direncanakan dan disusun dengan baik, pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi dengan baik terhadap tujuan yang terkandung dalam kebijakan program tersebut. Sebab jika suatu kebijakan maupun program tidak tercapai, maka kebijakan dan program tersebut dianggap gagal atau tidak berhasil, termasuk didalamnya pengelolaan perikanan berbasis masyarakat atau berbasis kerakyatan.¹²²

Dalam mengikuti program SEHATKAN inipun para pembudidaya ikan harus memenuhi beberapa persyaratan yang diharuskan seperti haruslah seseorang pembudidaya ikan yang hak atas tanahnya belum bersertifikat serta lemah diakses permodalan, dengan mengumpulkan bukti KTP, KK, bukti pembayaran SPPT/PBB, dan surat keterangan dari Kepala Desa serta mengisi Formulir.

¹²⁰ Kementrian Kelautan dan Perikanan, *Draf Petunjuk Teknis Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidayaan Ikan...*, hal.1

¹²¹ Wawancara dengan Pak Tatang, Selaku Kepala Dinas Perikanan tanggal 19 Maret 2018 jam 13.00 WIB di Dinas Perikanan Tulungagung

¹²² H. Supridi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia...* hal.47

Sebagaimana yang dikutip dari buku karangan Irfan dan Laily bahwa islam adalah ajaran yang berusaha menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dimana Rasulullah sebagai kepala negara dan masyarakat, maka basis dari peran dan fungsi negara dalam kegiatan ekonomi adalah prinsip keadilan. Titik berangkat dari konsep keadilan ini adalah ketika pemerintah menjadikan simpul terlemah masyarakat sebagai basis penyusunan kebijakan ekonomi. Untuk itu, agar prinsip keadilan ini dapat direalisasikan dalam kebijakan ekonomi pemerintah, maka pemerintah atau negara harus dapat memahami perannya dengan baik.¹²³

Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Anjang dan Hatim untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan Pembudidayaan ikan perlu adanya peran dari pemerintah, seperti pembentukan sebuah kelembagaan dan pembuatan program. Sehingga dari upaya tersebut, akan memudahkan bagi pihak pemerintah itu sendiri dalam melakukan kontrol dan pembinaan secara langsung kepada masyarakat pembudidaya.¹²⁴

¹²³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 108

¹²⁴ Anjang Bangun Prasetyo et.all, “*Perkembangan Budidaya Bandeng di Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus: Kendal, Pati, dan Pekalongan)*”, dalam www.sidik.litbang.kkp.go.id/index.php/searchkatalog/.../2143/123-1371.pdf diakses 12 Februari 2018

B. Dampak Yang Dirasakan Oleh Pembudidaya Ikan Setelah Adanya Akses Pembiayaan Melalui Program SEHATKAN Yang Dilakukan Oleh Dinas Perikanan

Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil memerlukan bantuan dana dalam mengembangkan usahanya dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah, sebab dalam kenyataan masyarakat yang terlibat di bidang pembudidaya ikan sangat banyak dan yang mereka rasakan adalah terbentur pada dana yang akan digerakkan dalam menunjang usahanya tersebut.¹²⁵

Dengan dibuatnya program SEHATKAN oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Dinas Perikanan ini juga memberikan dampak yang positif bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Tulungagung yaitu terpenuhinya modal untuk keperluan usaha yang berdampak pada terpenuhinya kebutuhan pakan yang diperlukan, terpenuhinya akan suplay benih, terpenuhinya sarana dan prasarana budidaya yang memadai, serta pemenuhan alat-alat budidaya yang dibutuhkan sehingga hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelolanya menjadi lebih baik.

Karena untuk menjamin kelancaran proses budidaya, penggunaan aset tetap memerlukan serangkaian tindakan pemeliharaan, termasuk penggantian komponen bangunan atau peralatan sehingga kembali ke kondisi mendekati normal. Kegiatan pemeliharaan prasarana budidaya menjadi penting karena dengan pemeliharaan yang tepat, bangunan dan peralatan senantiasa berada dalam kondisi normal dan dapat mencegah terjadinya

¹²⁵ H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*,... hal.202

kerusakan yang dapat mengganggu proses budidaya. Dengan menerapkan manajemen pemeliharaan, pembudidaya akan memperoleh peningkatan efisiensi yang pada akhirnya dapat menambah keuntungan.¹²⁶

Karena usaha sendiri merupakan suatu bentuk usaha yang didalamnya melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu negara.¹²⁷ Dan bisnis atau usaha yang diperbolehkan dalam Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah.¹²⁸

Sebagaimana yang dikutip dari buku karangan Irfan dan Laily bahwa dalam pandangan ajaran islam, penegakan kedaulatan ekonomi merupakan sebuah keniscayaan. Kedaulatan ekonomi ini adalah hal yang sangat esensial dan fundamental bagi setiap bangsa. Kedaulatan ekonomi sangat menentukan kedaulatan bangsa, dan jalan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi ini adalah melalui kebijakan ekonomi yang berbasis pada konsep masalah. Kemaslahatan akan tercapai ketika yang muncul dari sebuah proses adalah kemanfaatan dan keberkahan¹²⁹

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hikmah dan Maulana kondisi usaha perikanan setelah adanya peran dari pemerintah menjadi lebih baik dengan adanya bantuan PNPM. Perkembangan budidaya terjadi kenaikan

¹²⁶ Arif Sujoko, *Analisis Investasi Untuk Akuakultur*,...hal.32

¹²⁷ Harmaizar, *Menangkap Peluang Usaha*,...hal.15

¹²⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*,... hal. 196

¹²⁹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*,...hal.30

produksi setelah mendapat BLM PUMP-PB, terjadi kenaikan ikan niladari 9.135 Kg (sebelum adanya PUMP-PB) menjadi 11.940 Kg (setelah turunnya PUMP-PB) kenaikan produksi ini akan mempengaruhi kenaikan pendapatan usaha KUB sehingga dapat meningkatkan skala usaha budidaya.¹³⁰

C. Kendala Akses Pembiayaan Melalui Program SEHATKAN Dalam Mengembangkan Usaha Budidaya Ikan Oleh Dinas Perikanan Tulungagung

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam akses pembiayaan melalui program SEHATKAN dalam mengembangkan usaha budidaya ikan yaitu kendala internal (Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan) dan kendala eksternal (Kendala yang dihadapi oleh pembudidaya ikan).

1. Kendala Internal

Ada berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam pengelolaan program SEHATKAN yang bertujuan untuk mengembangkan usaha budidaya ikan antara lain kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah sehingga mengakibatkan kurangnya tenaga teknis yang dimiliki dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Sehingga banyak para pembudidaya ikan yang mengetahui adanya program

¹³⁰ Hikmah dan Maulana Firdaus, “Kinerja Program Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya”, (Jakarta: Jurnal Kebijakan Sosek KP, Volume 7, Nomor 1, 2017)

SEHATKAN ini yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.¹³¹

Dimana penyuluh memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mentransfer teknologi dan informasi yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan.¹³² Peran penyuluh perikanan disamping menjadikan pembudidaya aktif dan dinamis, juga berperan menciptakan iklim atau keadaan yang memungkinkan para pembudidaya mau melaksanakan hal-hal yang telah disosialisasikan atas dasar tidak merasa terpaksa dan dipaksa. Dapat dikatakan bahwa peran lembaga perikanan merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan penyampaian sesuatu yang baru yang lebih baik, akan menguntungkan para pembudidaya. Dengan tujuan meningkatkan kemauan dan kemampuan pembudidaya dalam mengelola sektor perikanan.¹³³

Peran pembangunan merupakan tugas pemerintah dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Fungsi negara sendiri dalam perspektif islam salah satunya adalah sebagai fungsi alokasi, dimana fungsi alokasi ini juga diaplikasikan dalam kebijakan penganggaran negara (APBN). Melalui APBN, uang negara yang ada

¹³¹ Wawancara dengan Pak Tatang, Selaku Kepala Dinas Perikanan tanggal 23 April 2018 jam 08.00 WIB di Dinas Perikanan Tulungagung

¹³² Maharani Yulisti dan Riesti Triyanti, “Peran Kelembagaan dalam Mendukung Program Minapolitan Budidaya di Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta”, (Jakarta: Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan, Volume 7, Nomor 1, 2012)

¹³³ Emy Khoifah R dan Harnies Marika Pasa, “Peran Dinas Perikanan dan Peternakan dalam Mengembangkan Usaha Perikanan Budidaya di Kecamatan Tlogosasi Kabupaten Bondowoso”, dalam jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/744/604 diakses 12 Februari 2018

dapat digunakan dalam beragam program *G to P transfer (government to people transfer)*.¹³⁴

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Syahrída bahwa dari kondisi internal organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan sektor internal agar tidak terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri dan masih perlu banyak dukungan serta pembinaan sehingga dari sektor perikanan bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan wilayah dan strategi pengembangannya dalam otonomi daerah dan pembangunan sektor perikanan harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Kabupaten Balangan dengan memberikan dana alokasi APBD yang cukup untuk sektor perikanan.¹³⁵

2. Kendala Eksternal

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa akuakultur merupakan usaha yang cukup beresiko, bahkan resikonya secara umum lebih besar daripada resiko dalam usaha peternakan maupun pertanian. Karena anggapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa usaha akuakultur dilakukan didalam air sehingga tidak mudah dilihat dan dikontrol.¹³⁶

Selain faktor media budidaya, variasi penyebab kegagalan dalam usaha budidaya ikan juga beragam seperti polusi, penyakit, keracunan

¹³⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*,...hal.110-111

¹³⁵ Syahrída Ariani, et.all., “Peran Sektor Perikanan dalam Pembangunan Wilayah dan Strategi Pembangunannya dalam Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Balangan”, (Banjarmasin: Jurnal Fish Scintiae, 2014)

¹³⁶ Arif Sujoko, *Analisis Investasi Untuk Akuakultur*,...hal.19

pakan, gangguan suplay air, kerusakanmesin dan peralatan, kerusakan wadah budidaya, kontinuitas suplay benih terbatas, fluktuasi cuaca ekstrim, predator, kerusakan sumber energi listrik, kelalaian pekerja, maupun bencana alam. Dalam hal ini semakin intensif teknologi yang digunakan, maka resiko kegagalan semakin besar.¹³⁷

Dan permodalanpun masih menjadi masalah klasik yang dihadapi oleh hampir setiap pembudidaya tradisional di Indonesia.¹³⁸ Dalam konteks Indonesia misalnya, penyaluran dana bagi sektor pertanian, kelautan dan perikanan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Hal tersebut dikarenakan oleh tingginya penyerapan angkatan kerja oleh sektor tersebut, serta minimnya akses permodalan yang membelit sektor ini.¹³⁹

D. Upaya dalam mengatasi permasalahan akses pembiayaan melalui program SEHATKAN dalam mengembangkan usaha budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Tulungagung

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dalam mengatasi kendala internal (kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan) dan kendala eksternal (kendala yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan) dalam mengembangkan usaha budidaya ikan melalui program SEHATKAN yaitu:

¹³⁷ *Ibid.*, hal.19

¹³⁸ Anjang Bangun Prasetyo et.all, “*Perkembangan Budidaya Bandeng di Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus: Kendal, Pati, dan Pekalongan)*”, dalam www.sidik.litbang.kkp.go.id/index.php/searchkatalog/.../2143/123-1371.pdf

¹³⁹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*,...hal.25

1. Upaya Dinas Perikanan dalam Mengatasi Kendala Internal

Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Tulungagung untuk mengatasi kendala dalam mengelola program SEHATKAN dalam mengembangkan usaha budidaya ikan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat serta melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dalam penyediaan anggaran yang dibutuhkan. Dan dalam mengatasi kendala kurangnya SDM atau tenaga teknis yang tersedia Dinas Perikanan Tulungagung juga melakukan koordinasi Dengan Kepala Pusat Penyuluh.¹⁴⁰

Selain itu upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Perikanan terkait kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Perikanan juga melakukan koordinasi dengan pihak BPN dan Penyuluh untuk melakukan sosialisasi, serta melakukan sosialisasi dan memberi tahu Pembudidaya Ikan terkait adanya program SEHATKAN melalui media sosial.¹⁴¹

Dalam kelembagaan diperlukan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang tepat untuk mampu tetap menjaga terciptanya sinkronisasi langkah pekerjaan dilapangan sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan timbulnya permasalahan secara lebih dini dan efektif dalam penanganannya. Perlunya koordinasi menurut pendapat Simon, bahwa keefektifan lembaga dalam usahanya mencapai tujuan tertentu tidak

¹⁴⁰ Wawancara dengan Pak Tatang, Selaku Kepala Dinas Perikanan tanggal 23 April 2018 jam 08.00 WIB di Dinas Perikanan Tulungagung

¹⁴¹ Wawancara dengan Bu Andra, selaku pengelola program SEHATKAN tanggal 22 Maret 2018 jam 09.00 WIB di Bidang Budidaya Dinas Perikanan Tulungagung

hanya tergantung pada aktivitasnya sendiri, tetapi juga bagaimana hubungan aktivitas yang dilakukan tersebut dengan yang sedang dilakukan pihak lain.¹⁴²

Koordinasi merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan harmonis dan efisien. Semakin besar ruang lingkup suatu organisasi, semakin terasa betapa pentingnya masalah koordinasi. Karena koordinasilah yang menghubungkan kegiatan berbagai macam cabang pekerjaan, yang menjamin terlaksananya garis politik yang ditentukan dan menghindarkan selisih paham atau kepentingan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan pandangan-pandangan atau paham-paham yang berbeda, bahkan juga pertentangan. Dengan demikian koordinasi merupakan suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.¹⁴³

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Amlia bahwa koordinasi merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan, mengingat masing-masing stakeholder memiliki tugas yang berbeda satu sama lain, namun bertanggung jawab dengan objek yang sama.¹⁴⁴

¹⁴² Amelia Indah Hermawaty, "Permasalahan Kelembagaan Pemanfaatan Waduk Darma untuk Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung di Kabupaten Kuningan Jawa Barat", (Semarang: Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 3, Nomor 2)

¹⁴³ Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Widiasurana, 2001), hal.122-123

¹⁴⁴ Amelia Indah Hermawaty, "Permasalahan Kelembagaan Pemanfaatan Waduk Darma untuk Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung di Kabupaten Kuningan Jawa Barat", (Semarang: Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 3, Nomor 2)

2. Upaya Dinas Perikanan dalam Mengatasi Kendala Eksternal

Terkait persoalan yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan di Kabupaten Tulungagung maka para pembudidaya ikan akan diarahkan oleh Dinas Perikanan untuk mengikuti program SEHATKAN, didalam program tersebut para pembudidaya ikan akan dibuatkan sertifikat tanah secara gratis yang nantinya akan dijadikan jaminan untuk mengakses permodalan, serta para pembudidaya ikan akan diarahkan untuk mengakses permodalan tersebut melalui kredit.¹⁴⁵

Sumber dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain, seperti lembaga pembiayaan. Lembaga-lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam penyaluran dananya dalam bentuk kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana bukanlah hal yang mudah, karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Salah satu persyaratan terpenting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan dan agunan. Dan dalam perkembangannya jaminan maupun agunan tersebut haruslah barang-barang yang bermutu tinggi dan mudah diperjual belikan.¹⁴⁶ Adapun tujuan utama dari pemberian kredit antara lain:¹⁴⁷

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Dan hasil lainnya bahwa nasabah yang

¹⁴⁵ Wawancara dengan Pak Tatang, Selaku Kepala Dinas Perikanan tanggal 19 Maret 2018 jam 13.00 WIB di Dinas Perikanan Tulungagung

¹⁴⁶ Abdul Rasyid Saliman et.all, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet.4 (Jakarta: Kencana, 2008), hal.17

¹⁴⁷ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hal.166-167

memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya, keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.

- b. Membantu usaha nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan usahanya.
- c. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, karena semakin banyaknya penyauran kredit, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.